

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI
MELAKUKAN PERGANTIAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

FILKA RAHMAWATI
NIM. C2C007043

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Filka Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007043
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BEI
MELAKUKAN PERGANTIAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Dosen Pembimbing : Marsono, S.E., M.Adv., Acc., Akt.

Semarang, 11 Juli 2011

Dosen Pembimbing,

(Marsono, S.E., M.Adv., Acc., Akt.)

NIP. 19711225 199903 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Filka Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007043
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BEI
MELAKUKAN PERGANTIAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Juli 2011

Tim Penguji

1. Marsono, S.E., M.Adv., Acc., Akt. (.....)
2. Dra.Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)
3. Drs. P. Basuki H.P, MBA., MSAcc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Filka Rahmawati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI MELAKUKAN PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 11 Juli 2011

Yang membuat pernyataan,

(Filka Rahmawati)

NIM : C2C007043

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari opini *going concern*, reputasi auditor, pergantian manajemen, kesulitan keuangan, dan kepemilikan institusional terhadap pergantian kantor akuntan publik. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pergantian auditor, memperlihatkan hasil-hasil yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian lain diperlukan untuk menguji teori tentang pergantian auditor.

Data pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2005-2009. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Opini *Going Concern* (OGC), Reputasi Auditor (RA), Pergantian Manajemen (PM), Kesulitan Keuangan (KK), dan Kepemilikan Institusional (KI). Dengan menggunakan analisis regresi logistik yang terdapat pada SPSS 16, penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh dari Opini *Going Concern*, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, dan kepemilikan Institusional terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Opini *Going Concern* tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik, (2) Reputasi Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik, (3) Pergantian Manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik, (4) Kesulitan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik, dan (5) kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik.

Kata Kunci: Pergantian Kantor Akuntan Publik, Opini *Going Concern*, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, dan Kepemilikan Institusional.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the effect of going concern opinion, auditor's reputation, management changes, financial distress, and institutional ownership on auditor switching in Indonesia. Some of past researches regardles auditor switching, shows different results. Therefore, another research needs to be done to verify theory of auditor switching.

The data being used is from manufacturing company which is listed in "Bursa Efek Indonesia" (BEI) in 2005-2009 period. The research variables being used are Going Concern Opinion (OGC), Auditor's Reputation (RA), Management Changes (PM), Financial Distress (KK), and Institutional Ownership (KI). Using logistic regression in SPSS 16 software, this research tried to test the effect of Going Concern Opinion, Auditor's Reputation, Management Changes, Financial Distress, and Institutional Ownership toward Auditor Switching.

The result of this research shows below: (1) Going Concern Opinion has insignificant effect for Auditor Switching, (2) Auditor's Reputation has significant effect on Auditor Switching, (3) Management Changes does not has significant effect toward Auditor Switching, (4) Financial Distress does not has significant effect on Auditor Switching, and (5) Institutional Ownership has insignificant effect for Auditor Switching.

Keywords: Auditor Switching, Going Concern Opinion, Auditor's Reputation, Management Changes, Financial Distress, and Institutional Ownership.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI MELAKUKAN PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK”** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H., Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Marsono, S.E., M.Adv., Acc., Akt. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, pengarahan, koreksi, dan waktu yang telah diluangkan untuk perwalian dan proses penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Keluarga penulis: Bapak Tani Mintadji, Ibu Sulastri, Kakak Arief Kurniawan, S.E., Kakak Ipar Eko Puji Lestari, dan Keponakan Chiharyu Cahaya Bintang. Terima kasih untuk segala dukungan baik secara moril maupun materiil serta doa yang telah diberikan.

4. Keluarga Bapak Suwarsono. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis tinggal di Semarang.
5. Mami Nurina Rahmadika, Mardhiyyah Ria Sari, Dian Mustika S.W., Ika Kurnia Aryani, Faristina Rosalin, dan Mariani. Terima kasih untuk kenangan, dukungan, doa, dan bantuan kalian selama hampir 4 tahun ini.
6. Kawan-kawan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2007. Terima kasih untuk kenangan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama kuliah.
7. Kawan-kawan KKN Desa Gunung Payung Kec. Candiroto Kab. Temanggung. Terima kasih untuk perhatian dan kenangan yang telah kalian berikan selama KKN. Ayo kapan kita KKN lagi.
8. Staf Tata Usaha, Ruang Data, dan Perpustakaan. Terima kasih telah membantu selama penulis berkuliah dan proses yang diperlukan.
9. Semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini merupakan hasil terbaik yang telah diberikan oleh penulis.

Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membacanya.

Semarang, 11 Juli 2011

Penulis

Filka Rahmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Teori Keagenan	12
2.1.2 Teori tentang <i>Audit Tenure</i>	13
2.1.3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003	15
2.1.4 Opini Audit <i>Going Concern</i>	16
2.1.5 Pergantian Komisaris	18
2.1.6 Reputasi Auditor	19
2.1.7 Kesulitan Keuangan	20
2.1.8 Kepemilikan Institusional.....	21
2.1.9 Penelitian Terdahulu	22
2.1.10 Ringkasan Penelitian Terdahulu	24
2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	30
3.1.1 Variabel Dependen	30
3.1.2 Variabel Independen	30
3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ..	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5 Metode Penelitian.....	33
3.5.1 Statistik Deskriptif	34
3.5.2 Pengujian Hipotesis Penelitian.....	34
3.5.3 Menguji Kelayakan Model Regresi	35

BAB IV	HASIL DAN ANALISIS.....	39
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	39
4.1.1	Deskripsi Umum Penelitian	39
4.1.2	Deskripsi Sampel Penelitian.....	40
4.2	Analisis Data.....	42
4.2.1	Statistik Deskriptif	42
4.2.2	Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	44
4.2.3	Hasil Pengujian Kelayakan Model Regresi..	46
4.3	Interpretasi Hasil.....	49
4.3.1	Pengaruh Opini <i>Going Concern</i> terhadap Pergantian KAP.....	49
4.3.2	Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Pergantian KAP.....	50
4.3.3	Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Pergantian KAP.....	51
4.3.4	Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Pergantian KAP.....	52
4.3.5	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pergantian KAP.....	53
BAB V	PENUTUP.....	57
5.1	Simpulan	57
5.2	Keterbatasan.....	60
5.3	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Dengan Kriteria	40
Tabel 4.2 Sampel Penelitian	41
Tabel 4.3 Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Usaha.....	43
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.5 Perbedaan Nilai -2LogLikelihood	45
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi	46
Tabel 4.7 Menguji Kelayakan Model Regresi.....	46
Tabel 4.8 Matriks Korelasi.....	47
Tabel 4.9 Matriks Klasifikasi	48
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik	48
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Penelitian	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	29

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Output SPSS	64
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan menyediakan berbagai informasi yang nantinya diperlukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan baik itu pihak internal maupun eksternal. Dalam menyajikan laporan keuangan harus memperhatikan dua karakteristik kualitatif yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Menurut FASB dalam SFAC No. 2 karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria dasar dalam memilih: (1) alternative metode akuntansi dan pelaporan keuangan, (2) persyaratan pengungkapan (*disclosure*) (Ghozali dan Chariri, 2007).

Kedua karakteristik kualitatif di atas sangat sulit untuk diukur sehingga dalam praktiknya para pemakai informasi dalam laporan keuangan membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen. Seorang auditor independen akan membuktikan kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen dan mendeteksi penyimpangan serius dari Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (GAAP) (Lin dan Liu, 2009). Dalam laporan keuangan ini terkandung informasi-informasi yang berisiko apabila salah diterjemahkan dan tidak terjamin kebenarannya. Seorang auditor memainkan peran penting dalam mengurangi risiko informasi, yang merupakan alasan ekonomi utama dibalik permintaan akan audit dan jasa pengauditan (Ismail, 2008). Jasa auditor independen digunakan untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat

diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010). Seorang auditor independen harus mampu berperilaku secara professional dan etis dalam tugasnya, sehingga hasil pekerjaannya ini dapat dipercaya relevansi dan keterandalannya.

Dalam menjaga sikap professional dan etis dalam hal ini independensi seorang auditor, maka auditor diharapkan tidak memiliki hubungan yang lebih dalam hal pekerjaan. Hubungan yang lebih ini mengacu pada sikap tidak independen karena telah merasa dekat setelah mengaudit selama sekian tahun dan akhirnya berpengaruh pada pemberian opini audit yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Untuk itu perlu adanya suatu regulasi mengenai kewajiban pergantian KAP. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mendapat penugasan mengaudit selama lima tahun berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dengan kewajiban mengganti KAP setelah melaksanakan audit selama enam tahun berturut-turut.

Adanya regulasi baru ini berawal dari kasus KAP Arthur Andersen dari Amerika Serikat di tahun 2001 yang gagal mempertahankan independensinya dengan kliennya yaitu Enron. Berkaca dari kasus ini, banyak negara termasuk Indonesia yang mulai memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan

menerapkan rotasi audit baik KAP maupun auditornya. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor ini dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 359/KMK.06/2003 pasal II tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikelurkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Langkah ini diharapkan mampu menjaga independensi seorang auditor dan menanggulangi berulangnya kasus Enron.

Namun, pergantian auditor yang terlalu sering dan bukan karena bersifat *mandatory* tentu akan memberikan efek yang tidak baik. Fenomena pergantian KAP telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan keuangan dan biaya monitoring aktivitas manajemen (Sinarwati, 2010). Terhadap pergantian KAP ini sebenarnya oleh pihak KAP dan BAPEPAM dianggap mengganggu karena memerlukan monitoring yang lebih serta dipercaya menimbulkan biaya yang lebih besar dibanding dengan manfaat yang didapat. Pihak KAP dan BAPEPAM sendiri tentu mengharapkan alasan yang jelas dibalik fenomena ini.

Isu-isu mengenai pergantian KAP telah banyak diteliti oleh para peneliti, akademisi, dan praktisi di negara-negara maju. Fenomena pergantian auditor telah mulai diteliti di Amerika Serikat tahun 1970-an sejak adanya pergantian auditor dalam jumlah besar disana (Ismail, 2008). AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) menyepakati bahwa fenomena pergantian auditor merupakan masalah utama yang dihadapi oleh CPA (Ismail, 2008).

Pemberian opini tertentu pada laporan keuangan auditan dianggap memberi pengaruh tertentu terhadap motivasi pergantian KAP. Opini audit *going concern* yang dikeluarkan oleh auditor diyakini memiliki pengaruh yang besar terhadap pergantian KAP (Sinarwati, 2010). Pemberian opini audit *going concern* dianggap akan memberikan respon negatif terhadap harga saham, sehingga memungkinkan terjadinya pergantian auditor/KAP. Opini Audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor di mana seorang auditor ingin memastikan perusahaan yang diaudit dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Opini audit ini merupakan suatu *audit report* dengan modifikasi mengenai *going concern* yang mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis atau tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang (Komalasari, 2007 yang dikutip Sinarwati, 2010).

Dalam memberikan opini audit *going concern* menurut Lenard *et . al.* (2007, dikutip Sinarwati, 2010), seorang auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar kewajiban/utang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang. Dalam SPAP seksi 341 (IAI, 2001) diberikan pedoman kepada auditor dalam mengevaluasi apakah terdapat suatu kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi mengenai Perseroan maupun Usaha Perseroan. Dalam struktur *Corporate Governance* di Indonesia, Dewan Komisaris yang memiliki kewenangan untuk menunjuk KAP. Apabila terjadi pergantian terhadap Dewan Komisaris, maka pergantian ini kemungkinan akan menimbulkan pergantian KAP. RUPS yang menuntut kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan yang baik terhadap perusahaan, mendorong Dewan Komisaris untuk menekan manajemen/Direksi untuk menampilkan performa yang baik. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dengan *principle*.

Para pemakai laporan keuangan, khususnya investor akan lebih cenderung untuk mempercayai data akuntansi yang dihasilkan oleh auditor dari KAP yang bereputasi (Praptitorini dan Januarti, 2007, dikutip Sinarwati, 2010), sehingga suatu perusahaan akan lebih cenderung untuk menggunakan jasa auditor yang bereputasi baik khususnya KAP *Big 4*. Dengan demikian bila suatu perusahaan telah memakai KAP yang dianggap bereputasi, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak akan mengganti KAP-nya.

Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa terdapat dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam bangkrut. Perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mengalami kesulitan keuangan) menghadapi ketidakpastian dalam bisnisnya, sehingga menimbulkan kondisi yang mengakibatkan perpindahan KAP. Schwartz dan Soo (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih cenderung untuk

melakukan pergantian KAP dikarenakan ketidakmampuan untuk membayar *fee* audit.

Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional (*institutional investor*) berperan dalam mengawasi perilaku manajer untuk selalu berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Pengawasan yang dilakukan ini diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan. Marganingsih et al (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap kualitas audit.

Independensi seorang akuntan publik juga menjadi sorotan apabila terlalu seringnya kasus pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Pada tahun 2010 mulai ramai diperbincangkan mengenai adanya pembahasan mengenai RUU Akuntan Publik oleh Komisi XI DPR RI. Dalam hal ini akuntan publik yang diwakili oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam *press release* IAPI pada 24 Agustus 2010, IAPI menolak hampir seluruh substansi pengaturan yang ada dalam RUU Akuntan Publik yaitu diantaranya mengenai aspek penerapan sanksi pidana, pengaturan perizinan dan kewenangan pengaturan profesi oleh Menteri Keuangan, dan liberalisasi akuntan asing.

RUU ini memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Menteri Keuangan untuk mengatur profesi akuntan publik, yaitu mulai dari perizinan, penetapan standar profesi dan kode etik akuntan publik, ujian sertifikasi profesi, pemeriksaan, penerapan sanksi termasuk juga keberadaan asosiasi profesi. Hal ini tentu dapat mengurangi independensi dan kemandirian akuntan publik karena

semua hal akan yang berkaitan dengan akuntan publik akan diatur oleh Pemerintah dan bukan oleh institusi akuntan publik. Terlalu seringnya berpindah KAP yang dilakukan oleh perusahaan tentu menimbulkan kesan bahwa KAP tidak cukup profesional dalam menjalankan kewajibannya, sehingga oleh Pemerintah merasa perlu untuk menetapkan UU yang mengatur tentang akuntan publik. Dengan adanya penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan berpindah KAP tentu dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya institusi akuntan publik, untuk mengetahui alasan-alasan dibalik fenomena ini.

Suatu perusahaan bebas untuk memilih auditor mereka sendiri, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan atas auditor dan keputusan untuk mengganti auditor. Faktor-faktor ini tentunya di luar ketentuan atau regulasi mengenai pergantian auditor. Apabila pergantian KAP didasarkan pada waktu audit yang telah mencapai lima tahun berturut-turut maka hal ini bersifat *mandatory* dan tidak menimbulkan pertanyaan.

Adanya wacana mengenai pengaturan profesi akuntan publik dengan adanya pembahasan RUU Akuntan Publik yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI yang tentunya akan mempengaruhi independensi profesi akuntan publik. Dengan adanya fenomena pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan yang bukan merupakan *mandatory* mendorong adanya wacana pengaturan akuntan publik. Dengan adanya penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan berpindah KAP tentu dapat membantu pihak-

pihak yang berkepentingan, diantaranya institusi akuntan publik, untuk mengetahui alasan-alasan dibalik fenomena ini.

Sebagaimana dijelaskan dalam alasan-alasan diatas maka, judul penelitian ini adalah **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI MELAKUKAN PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK”**

1.2 Rumusan Masalah

Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi adanya pergantian KAP adalah pemberian opini audit *going concern*, pergantian komisaris perusahaan, reputasi auditor/KAP, kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan, dan kepemilikan perusahaan oleh lembaga-lembaga keuangan (kepemilikan institusional).

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP). Dari data-data tersebut dapat disimpulkan perumusan masalah, yaitu:

1. Apakah pemberian opini audit *going concern* memiliki pengaruh positif terhadap pergantian KAP?
2. Apakah pergantian komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pergantian KAP?
3. Apakah reputasi auditor/KAP memiliki pengaruh negatif terhadap pergantian KAP?

4. Apakah kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pergantian KAP?
5. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pergantian KAP?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemberian opini audit *going concern* terhadap pergantian KAP.
2. Untuk menganalisis pengaruh pergantian komisaris yang dilakukan perusahaan terhadap pergantian KAP.
3. Untuk menganalisis pengaruh reputasi auditor/KAP terhadap pergantian KAP.
4. Untuk menganalisis pengaruh kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan terhadap pergantian KAP.
5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan perusahaan oleh institusi/lembaga keuangan terhadap pergantian KAP.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti:

1. KAP

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi KAP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai alasan-alasan dibalik pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat membantu proses monitoring dalam pergantian KAP yang dilakukan oleh KAP.

2. BAPEPAM

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi BAPEPAM, dimana memberikan informasi mengenai alasan-alasan dibalik pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat membantu proses monitoring dalam pergantian KAP yang dilakukan oleh BAPEPAM. BAPEPAM merasa pergantian KAP ini sebagai salah satu masalah utama karena membutuhkan pengawasan dan kontrol lebih dalam praktik pergantian KAP yang dilakukan perusahaan.

3. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan factor-faktor pergantian KAP.

4. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi informasi kepada investor alasan-alasan dibalik pergantian KAP oleh perusahaan, sehingga investor mampu memahami motif tersebut. Selama ini pergantian

KAP secara *voluntary* menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari pihak investor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini berupa:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, dan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, metode penelitian, yang berisi jenis data, populasi dan sampel yang akan dikumpulkan, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV: Analisis dan Hasil

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari analisis.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak investor dan para pemakai informasi laporan keuangan lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara *agent* dengan *principle* (Sinarwati, 2010). Terdapat tiga konflik kepentingan antara *principle* dengan *agent*, yaitu: (1) antara *shareholders* dan manajer, (2) antara *shareholders* dan *debtholders*, dan (3) antara manajer, *shareholders*, dan *debtholders* (Suparlan dan Andayani, 2010).

Dalam penelitian yang dilakukan Francis et al (1988) yang dikutip oleh Suparlan dan Andayani (2010), dilakukan pengujian apakah terdapat hubungan positif antara biaya agensi perusahaan dengan permintaan kualitas audit. Hal ini menjadi isu penting ketika pemilik perusahaan ingin mendapatkan kualitas audit yang lebih baik.

Dewan Komisaris selaku pengawas dan penasihat yang ditunjuk oleh para pemegang saham (RUPS) bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan kewajibannya ini Dewan Komisaris berkewenangan untuk menunjuk KAP. RUPS yang menuntut kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan yang baik terhadap perusahaan, mendorong Dewan

Komisaris untuk menekan manajemen/Direksi untuk menampilkan performa yang baik. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dengan *principle*.

Konflik kepentingan antara *agent* dengan *principle* tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya pergantian manajemen. Menurut DeFond (1992) dalam Suparlan dan Andayani (2010) manajer melihat bahwa pergantian auditor akan mampu mengatasi konflik agensi yang terjadi, sehingga manajemen yang baru akan mengusulkan kepada komisaris untuk melakukan pergantian KAP. Manajemen pengganti biasanya akan menerapkan metode akuntansi yang baru sehingga manajemen yang baru berharap bisa bekerja sama dengan KAP pengganti dan berharap bisa mendapatkan opini audit yang sesuai keinginan manajemen (Sinarwati, 2010).

2.1.2 Teori tentang *Audit Tenure*

Audit tenure merupakan masa pemberian jasa/masa jabatan dari suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 ayat 1 sampai 6 dijelaskan tentang pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Di dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai pembatasan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana tercantum dalam ayat 1 yaitu dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. KAP dan seorang Akuntan Publik dapat menerima penugasan kembali atas audit umum

untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas suatu laporan keuangan klien tersebut.

Isu mengenai independensi auditor menjadi isu utama yang muncul akibat dari lamanya seorang auditor dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya atau lamanya *audit tenure*. *International Federation of Accountant* (IFAC) menganggap bahwa kekerabatan antara auditor dengan klien sebagai suatu ancaman bagi independensi seorang auditor, sehingga pada tahun 2003, IFAC mengeluarkan suatu dokumen yang bernama *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting*. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kekerabatan yang berlebihan antara auditor dengan klien dapat mengakibatkan keragu-raguan atas opini yang diberikan oleh auditor atau kepuasan auditor. Atas dasar itulah dengan demikian, diperlukan suatu audit yang efektif untuk mengurangi keragu-raguan tersebut (IFAC, 2003 dalam Adiwibowo, 2009).

Menanggapi isu independensi akibat *audit tenure* ini, beberapa negara telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur batas masa jabatan seorang auditor dalam memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan suatu entitas. Di Indonesia sendiri, telah diatur mengenai hal ini dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.03/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal II (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan tersebut diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan tersebut mengatur salah satunya bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan

suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

2.1.3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal II tentang “Jasa Akuntan Publik”

Adanya isu-isu mengenai independensi seorang auditor menjadi semakin penting dan banyak menjadi pembicaraan serta pertanyaan pihak luas terkait dengan adanya skandal keuangan yang melibatkan independensi auditor sekitar awal 2000-an (kasus Enron, WorldCom, dan Arthur Andersen). Hal ini mendorong tuntutan kepada pemerintah sebagai regulator untuk ikut “campur tangan” dalam memfasilitasi semua pihak yang terkait diantaranya perusahaan, pihak auditor/akuntan publik, dan pihak eksternal lainnya. Bentuk campur tangan pemerintah dalam hal ini adalah membuat peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi auditor maupun masa kerja audit (*audit tenure*) (Wijayanti, 2010).

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengatur mengenai *audit tenure* ini dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal II tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002. Keputusan ini mengatur mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Keputusan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini memperbarui keputusan sebelumnya yaitu, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Penelitian ini menggunakan dasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal II tentang “Jasa Akuntan Publik” karena *setting* penelitian ini adalah tahun 2003-2009.

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian KAP

2.1.4.1 Opini Audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* merupakan suatu opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP 2001). Pada tahun 1988 Auditing Standard Board (ASB) menerbitkan Statement on Auditing Standard (SAS) No. 59: *The auditor's consideration of an entity's ability to continue as a going concern*, yang meminta auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan perusahaan klien untuk melanjutkan sebagai suatu *going concern*. Seorang auditor mempertimbangkan penerbitan opini *going concern* jika ia menemukan alasan atas keraguan keberlangsungan suatu perusahaan berdasarkan pengujian. (Junaidi dan Hartono, 2010).

Dalam SPAP seksi 341 (IAI, 2001) diberikan pedoman kepada auditor dalam mengevaluasi apakah terdapat suatu kesangsian besar mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut:

- (a) Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan proses audit dapat mengidentifikasi keadaan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas.
- (b) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka ia harus:
 - i. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - ii. Menentukan kemungkinan rencana tersebut dapat terlaksana secara efektif.
- (c) Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, maka ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
 - i. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak member pendapat.
 - ii. Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut memadai maka ia akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian

dengan paragraph penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

- iii. Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut tidak memadai maka ia akan member pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.1.4.2 Pergantian Komisaris

Menurut Tally (2009) dalam Suparlan dan Andayani (2010) pengukur *Corporate Governance* yang baik adalah dewan komisaris, pemisahan CEO dengan dewan direksi, dan kepemilikan institusional. Jensen (1993) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyebutkan bahwa kapasitas dewan komisaris untuk melakukan monitoring lebih efektif seiring dengan besarnya dewan komisaris, yang mengakibatkan meningkatnya kualitas laporan keuangan.

Indonesia menganut struktur *Corporate Governance* yang terdapat pemisahan antara *Board of Directors* (Dewan Komisaris) dan CEO (Dewan Direksi) yang sesuai dengan struktur *Corporate Governance* dengan standar Eropa. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 108 dijelaskan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada dewan direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan usaha Perseroan, Dewan Komisaris berkewenangan untuk mengangkat KAP melalui komite audit. Karena Dewan Komisaris yang berkewangan untuk mengangkat KAP, sehingga pergantian dalam keanggotaan Dewan Komisaris dianggap akan memberikan dampak terhadap penunjukkan KAP yang bertugas dan kemungkinan KAP yang ditunjuk akan berbeda dari KAP sebelumnya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pergantian komisaris adalah pergantian Dewan Komisaris, baik itu Presiden Komisaris atau salah satu anggotanya maupun keseluruhannya, karena setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

2.1.4.3 Reputasi Auditor

Investor akan lebih cenderung untuk memakai data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Praptitorini dan Januarti, 2007, seperti dikutip Sinarwati, 2010). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 16 disebutkan bahwa KAP dapat berbentuk:

- a. Perseorangan; KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.
- b. Persekutuan; KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan (persekutuan perdata atau persekutuan firma) hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2

(dua) orang Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan KAP/auditor yang bereputasi adalah KAP/auditor yang termasuk *Big 4*, sehingga perusahaan tidak akan mengganti KAP-nya jika KAP tersebut sudah berreputasi. Adapun auditor yang termasuk dalam kelompok *Big 4 Auditors* yaitu (berdasarkan alfabet):

- 1) *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
- 2) *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
- 3) *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta Siddharta & Widjaja.
- 4) *PricewaterhouseCooper* (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & Rekan; Tanudiredja, Wibisena & Rekan.

2.1.4.4 Kesulitan Keuangan

KAP Schwartz dan Soo (1995), seperti dikutip Sinarwati (2010), menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut (kesulitan keuangan) lebih sering untuk berpindah KAP daripada perusahaan yang tidak bangkrut (tidak kesulitan keuangan). Ketidakpastian bisnis perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat menimbulkan suatu kondisi yang mendorong perusahaan untuk berpindah KAP. Ancaman terhadap kesulitan keuangan juga

merupakan biaya yang akan dihadapi perusahaan. Karena manajemen lebih cenderung untuk menghabiskan waktu yang lebih banyak yang dilakukan untuk menghindari kebangkrutan daripada untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengelola perusahaan yang lebih baik.

Kesulitan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan DER (*debt to equity ratio*) yaitu dengan membagi nilai total aktiva dengan total ekuitas ($DER = \frac{total\ asset}{total\ equity}$). Tingkat DER yang aman adalah 100%. Nilai DER yang berada di atas 100% merupakan salah satu indikator dari memburuknya kondisi keuangan suatu perusahaan.

2.1.4.5 Kepemilikan Institusional

Shleifer et al (1997), seperti dikutip Suparlan dan Andayani (2010), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berperan mengawasi perilaku manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan perusahaan. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasinya yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010).

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan yang mencakup bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan lainnya.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2010, Ni Kadek Sinarwati dalam penelitiannya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan faktor-faktor seperti opini audit *going concern* yang diberikan auditor, pergantian manajemen yang terjadi di perusahaan, reputasi yang dimiliki auditor, dan kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan pergantian KAP. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa opini audit *going concern* yang diberikan oleh auditor ternyata tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Pergantian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan ternyata terbukti memberikan pengaruh positif terhadap pergantian komisaris. Reputasi auditor ternyata tidak memberikan pengaruh negatif dalam pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan kesulitan keuangan ternyata terbukti memberikan pengaruh positif terhadap pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian Wijayanti (2010) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung untuk berpindah KAP disebabkan oleh ukuran KAP. Sedangkan pergantian manajemen, dan *financial distress* ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Pada tahun 2010, Suparlan dan Wuryan Andayani dalam penelitiannya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP yang dilakukan perusahaan. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa kepemilikan institusional tidak

berpengaruh terhadap pergantian KAP. Pergantian manajemen dan *leverage/financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Pada tahun 2008, Shahnaz Ismail et al dalam penelitiannya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP di Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan pergantian KAP dipengaruhi oleh *leverage, sales growth, financing*, waktu keterlibatan auditor, dan *audit fee*.

Pada tahun 2007, Damayanti dan Sudarma dalam penelitiannya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan publik dari tahun 2003-2005 berpindah KAP. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Sedangkan pergantian manajemen dan kesulitan keuangan ternyata tidak berpengaruh signifikan dengan pergantian komisaris.

Stefanie L. Tate (2007) dalam penelitiannya membahas tentang faktor-faktor berpindah KAP dan pemilihan KAP pada perusahaan nirlaba. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perubahan dalam struktur operasional sebuah organisasi atau perusahaan nirlaba dan perubahan dalam pembiayaan dan *leverage* organisasi atau perusahaan nirlaba signifikan dalam keputusan organisasi tersebut untuk berpindah auditor dan pemilihan terhadap auditor yang baru.

Dalam penelitiannya Hudaib dan Cooke (2007) meneliti tentang pengaruh dari pergantian komisaris dan *financial distress* bersama-sama dengan *variabel control* (jenis KAP, *audit fees*, dan ukuran perusahaan) terhadap pergantian auditor (*auditor switching*). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa

auditee yang mengalami *financial distress* dan melakukan pergantian manajemen paling mungkin untuk berganti auditor.

2.1.6 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Sinarwati	2010	“Mengapa Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini audit <i>going concern</i> tidak berpengaruh signifikan. 2. Pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan. 3. Reputasi Auditor tidak berpengaruh signifikan. 4. <i>Financial distress</i> berpengaruh signifikan.
Wijayanti	2010	“Analisis Hubungan Auditor-Klien: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> di Indonesia”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran KAP berpengaruh signifikan. 2. Pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan. 3. <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh

			signifikan.
Suparlan dan Andayani	2010	“Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. 2. Pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan. 3. <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh signifikan.
Ismail et al	2008	“ <i>Why Malaysian Second Board Companies Switch Auditors: Evidence of Bursa Malaysia</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage/financial distress</i> berpengaruh signifikan.
Damayanti dan Sudarma	2007	“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan. 2. Kesulitan keuangan tidak berpengaruh signifikan. 3. Ukuran KAP berpengaruh signifikan.
Tate	2007	“ <i>Auditor Change and Auditor Choice in Non-Profit Organizations</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan.
Hudaib dan Cooke	2005	“Qualified Audit Opinions and Auditor Switching”	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>auditee</i> yang mengalami <i>financial distress</i>

			dan melakukan pergantian manajemen paling mungkin untuk berganti auditor.
--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Opini Audit *Going Concern* yang Diberikan Oleh Auditor

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Opini ini menjelaskan keragu-raguan tentang kelangsungan hidup perusahaan ke depannya, sehingga mengkonfirmasi kondisi perusahaan yang terganggu atau memburuk. Menurut Jones (1996), Meludav dan Ziv (1997) dalam Sinarwati menyatakan bahwa jika suatu perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* maka perusahaan tersebut akan mendapatkan respon negatif terhadap harga sahamnya, sehingga perusahaan kemungkinan besar akan melakukan pergantian KAP.

H1 : Terdapat pengaruh positif opini audit *going concern* terhadap pergantian KAP.

2.2.2 Reputasi Auditor

Menurut Sinarwati (2010), berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu *self interest*, maka kehadiran pihak ketiga sebagai mediator hubungan keagenan diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor sebagai pihak eksternal melihat informasi akuntansi yang dihasilkan oleh

manajemen perusahaan cenderung lebih mempercayai yang dihasilkan oleh auditor yang telah memiliki reputasi yang baik. KAP/auditor yang bereputasi dalam penelitian ini adalah yang termasuk dalam *Big 4*. Menurut Sinarwati (2010) bahwa “perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAP nya sudah bereputasi”.

H2 : Terdapat pengaruh negatif reputasi auditor terhadap pergantian KAP.

2.2.3 Pergantian Komisaris

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi mengenai Perseroan maupun Usaha Perseroan. Dalam struktur *Corporate Governance* di Indonesia, Dewan Komisaris yang memiliki kewenangan untuk menunjuk KAP. Apabila terjadi pergantian terhadap Dewan Komisaris, maka pergantian ini kemungkinan akan menimbulkan pergantian KAP.

H3 : Terdapat pengaruh positif pergantian komisaris terhadap pergantian KAP

2.2.4 Kesulitan Keuangan

Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau terancam bangkrut dapat menimbulkan suatu kondisi yang mendorong perusahaan untuk berpindah KAP. KAP Schwartz dan Soo (1995) yang dikutip Sinarwati (2010) menyatakan bahwa kecenderungan untuk berpindah KAP pada perusahaan yang bangkrut lebih sering daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Kesulitan keuangan signifikan yang dihadapi perusahaan mempengaruhi perusahaan yang

terancam bangkrut untuk berpindah KAP (Schwartz dan Menon, 1985, dikutip Sinarwati, 2010).

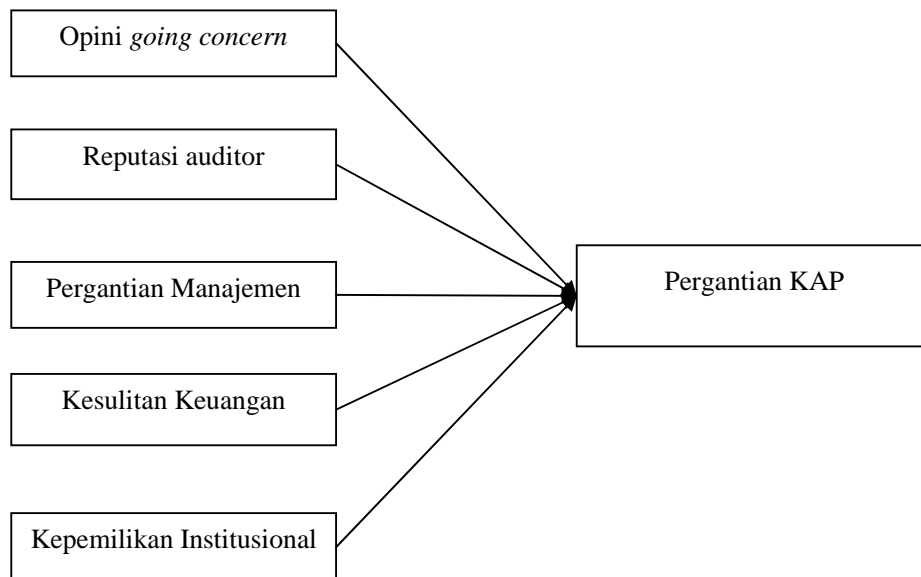
H4 : Terdapat pengaruh positif kesulitan keuangan terhadap pergantian KAP

2.2.5 Kepemilikan Institusional

Terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan adalah diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari pemilik. Kepemilikan perusahaan oleh institusi mengharapkan kinerja manajer lebih baik dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Chan et al (2007) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi menentukan peningkatan permintaan kualitas audit. Maka kepemilikan institusional menimbulkan permintaan akan auditor yang dianggap lebih baik, sehingga menimbulkan pergantian KAP.

H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

Kerangka Pemikiran Teoritis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei
Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik



Gambar 2.1 Bagan kerangka pemikiran teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dari peneliti. Variabel dependen penelitian ini adalah pergantian KAP. Definisi variabel pergantian KAP adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2005-2009, telah melakukan pergantian KAP selama periode tersebut dan melakukan pergantian bukan karena *mandatory*. Variabel pergantian KAP ini adalah variabel *dummy*, jika perusahaan melakukan pergantian KAP diberi kode 1 dan jika tidak diberi kode 0. Maksud pergantian KAP disini adalah jika perusahaan menggunakan KAP yang berbeda di tiap tahunnya dan bukan bersifat *mandatory*. Jika terjadi pergantian salah satu partner atau lebih, dimaksudkan sebagai rotasi partner dan bukan pergantian KAP.

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependennya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, kesulitan keuangan, dan kepemilikan institusional.

a. Opini *Going Concern*

Variabel opini *going concern* adalah variabel *dummy*, jika perusahaan mendapatkan opini *going concern* diberi kode 1 dan jika tidak diberi kode 0. Maksud dari opini *going concern* adalah jika dalam laporan auditor independen terdapat pernyataan auditor atas kelangsungan hidup entitas, baik yang tertera dalam paragraf ke empat laporan auditor independen maupun dalam penjelasan atas laporan keuangan auditan (Sinarwati, 2010). Penerimaan opini audit ini akan dibandingkan antara laporan keuangan periode sebelumnya dengan periode berikutnya.

b. Reputasi Auditor

Dalam penelitian ini reputasi auditor diproksikan sebagai KAP yang berafiliasi dengan *Big 4 Auditors*. Variabel ini adalah variabel *dummy* dimana jika KAP termasuk dalam *Big Four Auditors* diberi kode 1 dan jika tidak diberi kode 0. Auditor yang termasuk dalam afiliasi KAP *Big 4* telah disebutkan pada bab sebelumnya.

c. Pergantian komisaris

Pergantian komisaris merupakan pergantian susunan dewan komisaris perusahaan yang, terutama, disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham atau komisaris yang berhenti karena kemauan sendiri. Variabel pergantian komisaris merupakan variabel *dummy*, jika perusahaan melakukan pergantian komisaris diberi kode 1 dan jika tidak diberi kode 0. Pergantian komisaris disini memiliki arti pergantian salah satu atau keseluruhan dari dewan komisaris.

d. Kesulitan Keuangan

Dalam penelitian ini kesulitan keuangan diproksikan dengan rasio total utang dengan modal sendiri/ekuitas (*debt to equity ratio/ DER*) yang mengacu pada penelitian Ismail (2008) dan Sinarwati (2010).

e. Kepemilikan Institusional

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase kepemilikan saham. Apabila kepemilikan saham mayoritas atau beberapa saham minortas tetapi dimiliki oleh institusi-institusi maka kepemilikan saham tersebut dianggap dimiliki oleh institusi. Yang dimaksud institusi disini adalah lembaga-lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya (Koh, 2003 dalam Suparlan dan Andayani 2010).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2005-2009. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampling berdasarkan kriteria-kriteria dan tujuan tertentu. Kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Perusahaan tersebut telah melakukan pergantian KAP dalam periode tahun 2005-2009.
3. Tidak diaudit oleh KAP yang sama selama lima tahun berturut-turut (KMK No.359/KMK.06/2003) dan kemudian diperbarui dengan PKK

No.17/PKK.01/2008 dengan peraturan tidak diaudit oleh KAP yang sama selama enam tahun berturut-turut.

4. Mengandung informasi yang mencakup semua definisi operasional penelitian, yaitu: pemberian opini audit *going concern*, perusahaan melakukan pergantian komisaris (pergantian CEO), reputasi auditor/KAP yang baik (afiliasi *Big 4*), perusahaan mengalami kesulitan keuangan, kepemilikan institusional terhadap perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan auditan perusahaan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2009.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data dikumpulkan dan dicatat, sedangkan untuk studi pustaka diperoleh dari penelitian terdahulu dan ditunjang dengan literatur lain yang menunjang. Data perusahaan yang melakukan pergantian KAP diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BEI selama periode penelitian.

3.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi logistik karena variabel dependennya bersifat dikotomi (melakukan *auditor*

switching dan tidak melakukan *auditor switching*). Asumsi *normal distribution* tidak dapat dipenuhi karena variabel independen merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik). Dalam hal ini dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik (*logistic regression*) karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik (*logistic regression*) dapat dijelaskan sebagai (Ghozali, 2007):

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), deviasi standar (*standard deviation*), dan maksimum-minimum. *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Deviasi standar digunakan untuk menialai disperse rata-rata dari sampel. Sedangkan maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai maksimum dan minimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

3.5.2 Pengujian Hipotesis Penelitian

Estimasi parameter menggunakan *Maximum Likelihood Estimation (MLE)*.

$$H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = \dots = b_i = 0$$

$$H_0 \neq b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq \dots \neq b_i \neq 0$$

Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen (x) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel respon yang diperhatikan (dalam populasi). Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan $\alpha = 5\%$. Kaidah dalam pengambilan keputusan adalah:

1. Jika nilai probabilitas (sig.) $< \alpha = 5\%$ maka hipotesis alternative diterima.
2. Jika nilai probabilitas (sig.) $> \alpha = 5\%$ maka hipotesis alternative tidak dapat diterima.

3.5.2.1 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai keseluruhan model (*overall model fit*). Beberapa tes statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai *model fit* adalah:

H_0 : Model yang dihipotesiskan *fit* dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data

Dari hipotesis tersebut yang kita lakukan adalah jelas tidak akan menolak H_0 agar model *fit* dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood*. *Likelihood* L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}L$. Penurunan *likelihood* ($-2LL$) menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

3.5.2.2 Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Cox dan *Snell's R Square* merupakan ukuran yang mencoba untuk meniru ukuran R^2 pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu), sehingga sulit diinterpretasikan.

3.5.2.3 Menguji Kelayakan Model Regresi

3.5.2.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2007).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dari lawannya dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas yang manakah yang dijelaskan oleh variabelbebas lainnya. Apabila nilai tolerance diatas sepuluh persen dan VIF dibawah sepuluh, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

3.5.2.5 Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi logistik untuk memprediksi kemungkinan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan.

3.5.2.6 Model Regresi Logistik Yang Terbentuk

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi logistik (*logistic regression*). Analisis dilakukan dengan melihat pengaruh opini audit *going concern* yang diberikan oleh auditor, reputasi auditor, pergantian komisaris yang dilakukan oleh perusahaan, kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan, dan kepemilikan perusahaan oleh institusi terhadap pergantian auditor/KAP (*auditor switching*) yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Adapun model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$SWITCH/PKAP = \alpha + \beta_1 OGC + \beta_2 KAP + \beta_3 PK + \beta_4 KK + \beta_5 KI + e \dots 3.1$$

Keterangan:

α	= Konstanta
SWICTH/PKAP	= Pergantian KAP
OGC	= Opini <i>Going Concern</i>
KAP	= Reputasi Auditor
PK	= Pergantian Komisaris
KK	= Kesulitan Keuangan

KI	= Kepemilikan Institusi
β_i	= Koefisien Regresi, di mana $i=1,2,3,4,5$
ε	= Error